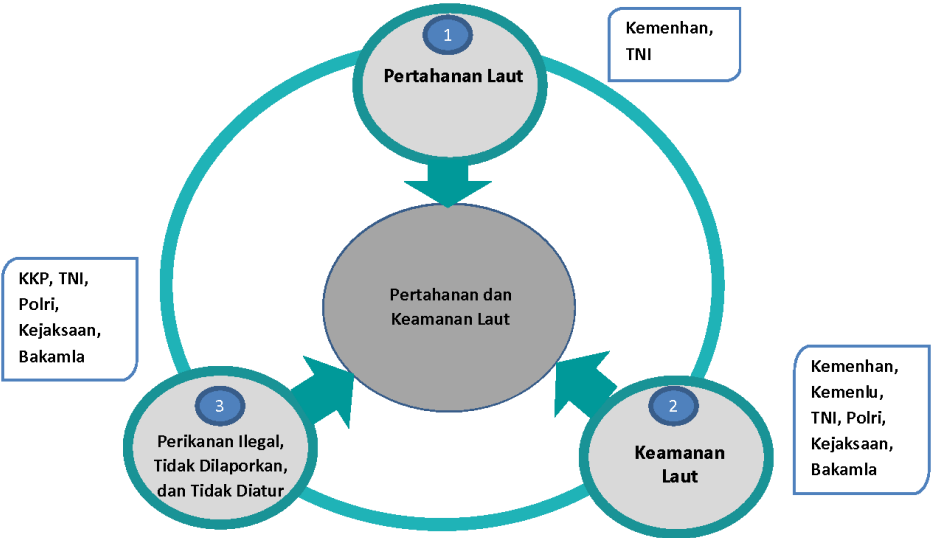


PROGRAM PRIORITAS D
PERTAHANAN DAN KEAMANAN LAUT

PROGRAM PRIORITAS D
PERTAHANAN DAN KEAMANAN LAUT

Program prioritas pertahanan dan keamanan laut terdiri dari 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Pertahanan Laut; (2) Keamanan Laut; dan (3) Perikanan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*). Secara skematik, 3 (tiga) kegiatan prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



Isu dan Kondisi Saat ini

1. Pertahanan Laut

Posisi geografis dan geopolitis Indonesia yang sangat strategis membentang dari timur Samudera Hindia hingga barat Samudera Pasifik, dengan luas wilayah perairan dan yurisdiksi laut mencapai 5,8 juta km² atau merupakan 70% dari total wilayah Indonesia, yang terdiri dari 3,1 juta km² perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEL), serta berbatasan maritim dengan 10 (sepuluh) negara tetangga Hal tersebut menjadikan posisi Indonesia sebagai persinggungan berbagai kepentingan pihak/negara lain, sehingga kemampuan pertahanan laut yang kuat menjadi sebuah

kebutuhan untuk menegakkan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman yang muncul.

Berbagai kepentingan yang akan saling bertemu di wilayah laut Indonesia, mengharuskan adanya kekuatan pertahanan laut yang kuat dan efektif dalam menjaga kedaulatan bangsa. Sengketa perbatasan laut dan adanya kapal-kapal asing yang berlayar tanpa memerlukan izin melalui wilayah kedaulatan RI merupakan beberapa tantangan yang harus selalu diperhitungkan. Kemampuan TNI sebagai penjaga kedaulatan perlu didukung dengan alutsista yang memadai sejalan dengan luasnya cakupan wilayah operasi. Pemenuhan *minimum essential force* merupakan program pemerintah untuk modernisasi militer Indonesia sebagai suatu kebutuhan yang penting menuju sistem pertahanan dan keamanan laut yang kuat dengan postur yang proporsional sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang dihadapi.

Sistem pertahanan negara Indonesia pada dasarnya merupakan sistem pertahanan semesta (sishanta) yang terdiri dari komponen utama (TNI), komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan/pendukung matra laut dapat berupa kapal-kapal pemerintah, kapal-kapal sipil, kapal nelayan, dan masyarakat maritim. Untuk itu, kemampuan sistem pertahanan semesta merupakan sebuah keharusan.

2. Keamanan Laut

Keamanan laut yang diharapkan adalah terciptanya kondisi laut yang bebas dari ancaman kekerasan, ancaman terhadap sumber daya laut dan lingkungan, ancaman pelanggaran hukum. Keamanan laut/maritim menjadi unsur penting pembangunan kemaritiman. Secara garis besar, tantangan dan isu-isu utama dari ancaman keamanan maritim di Indonesia adalah: (1) perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, serta *trans-national crimes*; (2) klaim kedaulatan; (3) pengamanan navigasi laut baik yang melalui ALKI ataupun alur laut lainnya dalam laut wilayah dan laut perairan kepulauan Indonesia; (4) belum optimalnya sumber daya pertahanan laut Indonesia, yang terdiri atas sumber daya manusia, alutsista dan infrastruktur pengawasan, teknologi pertahanan, serta data dan informasi pertahanan. Tantangan lainnya, dibutuhkan sebuah *National Integrated Surveillance System* (NISS) yang mampu mengoptimalkan sumber daya dalam sebuah Sistem Komando Pengambilan

Keputusan. Saat ini, penjagaan terhadap keamanan laut masih dihadapkan pada kendala keterbatasan sistem dan informasi serta sarana dan prasarana dalam pengawasan dan penindakan, serta belum optimalnya keterpaduan antar pemangku kepentingan dalam menangani masalah keamanan laut.

Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan akan terus ada sejalan dengan perkembangan di bidang ekonomi serta teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itulah dalam konteks keamanan laut/maritim ini dibutuhkan peran TNI yang kuat sebagai penjaga kedaulatan dan mempunyai kemampuan *deterrence effect* terhadap negara lain yang berani mencoba mengusik kedaulatan di wilayah Indonesia.

3. Perikanan Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*) dan Kejahatan Perikanan (*Fisheries Crimes*)

Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing (IUU Fishing) adalah praktek eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan melanggar aturan. Indonesia telah menjadi sasaran praktek *IUU Fishing* sejak lama sehingga menimbulkan kerugian sangat besar. *IUU Fishing* dapat terjadi pada semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan, dan intensitas eksploitasi, baik pada perikanan skala kecil maupun industri, di zona yurisdiksi nasional maupun internasional seperti *high seas*.

Selanjutnya, perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai kejahatan yang serius seperti pemalsuan dokumen, penyelundupan dan perdagangan orang dalam mata rantai *IUU Fishing* atau yang disebut sebagai kejahatan perikanan yang memerlukan penanganan terpadu.

Secara rinci, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016–2019 untuk program prioritas pertahanan dan keamanan laut, dapat dilihat pada matriks berikut:

RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016-2019
PROGRAM PRIORITAS D. PERTAHANAN DAN KEAMANAN LAUT

Sasaran Utama: Menurunnya pelanggaran di wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia											
NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
D.1 PERTAHANAN LAUT; D.2 KEAMANAN LAUT; D.3 PERIKANAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR (IUU FISHING)											
1	Pembangun-an Pertahan-an dan Ke-aman-an Laut yang Tang-guh;	Modernisasi alat utama sistem perta-hanan (alut-sista) dan non-alutsista serta pengem-bangan fasili-tas sarana dan prasara-na	Peningkatan dan pengada-an fasilitas sarana dan prasarana	Pembangunan pangkalan Angkatan Laut di Kepulauan Natuna	-	1 pangkal-an	-	-	Kemenhan	TNI	APBN
				Pembangunan dermaga	-	10 dermaga	-	-	Kemenhan	TNI	APBN
			Pengadaan Landing Helicopter Dock (LHD)	1 paket	-	-	-	-	Kemenhan	TNI	APBN
		Peningkatan/ pengadaan senjata elek-tronika dan amunisi	Terpenuhi-nya senjata dan amunisi	Amunisi Kapal Republik Indonesia (KRI)	-	8 jenis (27.274 butir)	-	-	Kemenhan	TNI	APBN
		Peningkatan/ pengadaan	Peningkatan kesiapan dan	Jumlah der-maga yang di-	10 dermaga	12 dermaga	10 dermaga	10 dermaga	TNI		APBN